

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita yang juga dalam agama islam merupakan suatu ibadah, yang dalam masyarakat terdapat perkawinan monogami yaitu seorang suami dan seorang istri tetapi ada juga perkawinan poligami yaitu seorang suami dengan lebih dari seorang istri dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku untuk pelaksannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Untuk mengetahui fungsi perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami. 2) Untuk mengetahui kedudukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami. 3) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menentukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa : 1) Fungsi perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami sebagai kepastian atau adanya batasan hak yang diterima istri dan anak selama perkawinan berlangsung dan sebagai pengukur agar suami dapat bertindak dengan adil dalam perkawinan poligami. 2) kedudukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami yaitu hak istri berbanding seimbang dengan suami baik sesudah adanya perkawinan kedua dan begitu juga dengan hak anak tetap mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menentukan hak istri dan anak dalam perkawinan poligami dengan dibuatnya perjanjian kawin yang otentik yang mengatur batasan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan poligami, adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian dengan observasi sesuai dengan rumusan masalah yaitu fungsi perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak dalam perkawinan poligami, penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan penelitian sosiologis dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer, kesimpulan dari penelitian pada rumusan masalah yang diangkat yaitu, 1) dalam perkawinan poligami adanya pembuatan perjanjian perkawinan dapat memberikan fungsi bagi para pihak yang berupa kebebasan dalam bertindak, penegakan keadilan dan juga melindungi hak dan kedudukan suami istri dari tindakan sewenang-wenang baik oleh suami maupun istri, dan apabila berahirnya suatu perkawinan dapat mengatur harta akibat dari perkawinan dengan adanya kepastian harta bersama dan harta bawaan atau milim para pihak sehingga dalam pembagian harta tersebut memiliki pembagian yang jelas antara istri pertama, kedua, ketiga maupun keempat. 2) kedudukan yang dimiliki istri dalam perkawinan poligami baik istri pertama, kedua, dan seterusnya memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan perkawinan pada umumnya yaitu perkawinan monogami, dimana tidak adanya ketentuan yang menyatakan bahwa istri memiliki kedudukan yang berbeda dalam rumah tangga sehingga suami harus berlaku adil terhadap setiap istri dan anak yang dia miliki, dalam harta bersama hak istri dan anak tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama baik itu istri pertama, kedua, dan seterusnya, tetapi dalam perkawinan poligami harus ditegaskan bahwa harta bersama yang diperoleh dimulai sejak dilangsungkannya pernikahan atau sejak dilaksanakannya akad nikah. 3) upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkawinan poligami yaitu dengan memastikan dalam permohonan izin poligami di pengadilan mencantumkan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan dan juga mencantumkan bahwa pihak ketika atau calon istri berikutnya tidak akan menuntut harta tersebut, dan juga membuat perjanjian kawin untuk menuntut dipenuhinya hak-hak yang harus diterima istri dan anak baik secara rohani maupun jasmani sehingga apabila terjadi wanprestasi istri dan anak dapat menuntut dipenuhinya hak tersebut atau adanya sangsi bagi pihak yang wanprestasi.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Perjanjian Kawin, Hak Istri dan Anak

ABSTRACT

Marriage is a bond between a man and a woman who is also in the religion of Islam is a worship, which in the community there is monogamous marriage is a husband and a wife but there is also the marriage of polygamy a husband with More than a wife in the presence of legal provisions applicable to her implementation. The purpose of this research is to: 1) to know the function of the marital agreement can provide legal protection against the rights of wives and children in the marriage of polygamy. 2) to know the right of wife and child in polygamy marriage. 3) to know the legal remedies that can be done to determine the right of wife and child in polygamy marriage. Based on the results of data analysis concluded that: 1) the function of the marital agreement can provide legal protection against the rights of wives and children in polygamy marriage as a certainty or the limitations of the rights that wives and children receive during Marriage takes place and as a gauge so husbands can act justly in polygamy marriages. 2) The right position of wife and child in polygamy marriage is the right of the wife in proportion to the husband both after the second marriage and so also with the rights of children remain entitled in accordance with the provisions of the law. 3) Remedies that can be done to determine the rights of the Law and the child in a polygamous marriage with the creation of an authentic marriage treaty that regulates the boundaries between the rights and obligations of husband and wife in the marriage of polygamy, the research method Which is used is the method of sociological juridical approach that is a research with observations according to the problem formulation of the function of marriage treaty as legal protection against the rights of wives and children in marriage polygamy, research Juridically conducted by researching legal materials that are secondary data and sociological research conducted by researching the field that is primary data, the conclusion of the research on the formulation of problems raised IE, 1) In the polygamy of the existence of the creation of a marriage treaty can provide function for the parties who are in the form of freedom in action, enforcement of justice and also protecting the rights and position of the husband of the act of arbitrary good by the husband As well as wives, and when the marriage of a wedding can arrange the property of marriage by the certainty of the common property and the innate property or milim of the parties so that the division of the property has a clear division between the wives First, second, third or fourth. 2) The position that the wife has in the marriage of polygamy both the first wife, second, and so on has the same right and position with the marriage in general that is monogamous marriage, where the absence of provisions stating that the wife Have a different position in the home so that the husband should be fair to every wife and child he has, in a joint possession the right of the wife and child to have the same right and position whether it was the first wife, second, and so on, But in the marriage of polygamy should be asserted that the shared property that is acquired has been initiated since the marriage or the implementation of Akad marriage. 3) The legal remedies that can be done in a polygamy marriage are by ensuring in the application of polygamy permits in the courts listing the shared treasures that have been acquired during the marriage and also listing that the current or prospective wife Will not claim the property, and also make a marriage agreement to prosecute the fulfillment of the rights that the wife and child should receive both spiritually and temporally so that if there is a default the wife and child can sue The right to fulfill the rights or sanctions for the party.

Keywords: marriage, polygamy, married covenant, wife and Child rights